



Ratusan Pengusaha Langgar Prokes

■ DPRD Dorong Pemkot Beri Sanksi Tegas

**Sebenarnya,
untuk masker itu
kan menyangkut
perilaku dan kita
tidak bisa meng-
awasi setiap saat.
Makanya, kami
minta untuk tetap
jaga diri dengan
memakai masker.**

Agus Winarno
Kasat Pol PP Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Sebagian besar pelaku usaha di Kota Yogyakarta belum menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan baik dan benar. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) pun mencatat, dari 1.156 pelaku usaha yang disambangi, 59 persen di antaranya kedapatan melanggar.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarno, berujar, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha itu beragam jenis, yang didominasi tidak adanya tanda jaga jarak (45 persen). Lalu, tidak menyediakan tempat cuci tangan (31 persen), penjual tidak mengenakan masker (16 persen) serta usaha kelas menengah keatas yang tidak menyediakan thermogun (8 persen).

Ia pun memastikan, seluruh tempat usaha tersebut sudah mendapat peringatan secara tertulis, agar mengubah pola perilakunya dalam menjalankan aktivitasnya. Pasalnya, jika dalam pemantauan mereka masih kedapatan melanggar, tindakan penu-

• *ke halaman 15

TIDAK DISIPLIN

- Sat Pol PP Kota Yogyakarta mencatat dari 1.156 pelaku usaha, 59 persen melanggar protokol kesehatan.
- Seluruh tempat usaha tersebut sudah mendapat peringatan secara tertulis.
- Jika dalam pemantauan mereka masih kedapatan melanggar, tindakan penutupan bisa saja ditempuh.
- Sat Pol PP sudah memanggil salah satu pemilik angkutan di Kecamatan Gondokusuman yang terbukti melanggar protokol kesehatan.
- DPRD mendorong Pemkot Yogyakarta untuk berani memberikan sanksi tegas.

JENIS PELANGGARAN

- Tidak adanya tanda jaga jarak (45 persen)
- Tidak menyediakan tempat cuci tangan (31 persen)
- Penjual tidak mengenakan masker (16 persen)
- Usaha kelas menengah ke atas tidak menyediakan thermogun (8 persen)

Ratusan Pengusaha Langgar

• Sambungan Hal 9

tupan bisa saja ditempuhnya.

"Sebenarnya, untuk masker itu kan menyangkut perilaku dan kita tidak bisa mengawasi setiap saat. Makanya, kami minta untuk tetap jaga diri dengan memakai masker. Tidak usah menunggu petugas datang baru dipakai maskernya ya," tegasnya, saat dikonfirmasi Jumat (11/12).

Agus juga mencontohkan, kisaran minggu lalu pihaknya baru saja memanggil salah satu pemilik angkringan di Kecamatan Gondokusuman yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, ketika pengunjung melimpah, mereka mulai mengabaikan imbuhan soal menjaga jarak.

"Kita panggil pemiliknya ke kecamatan, minggu lalu itu. Kita harapkan bisa bekerja sama lah. Mereka bilang kesulitan kalau banyak pembeli. Lalu, saya minta untuk tegas, kalau ada yang melanggar, ya diperingatkan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap, dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta dalam beberapa waktu terakhir, pelaku usa-

ha, atau masyarakat pada umumnya, diharapkan bisa lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah sebaran yang makin luas.

"Sekarang penularan Covid-19 ini kan sudah tidak hanya dari riwayat perjalanan jarak jauh saja, tetapi sudah terjadi antar antar anggota keluarga, atau tetangga terdekat. Jadi, kami berharap masyarakat tidak abai," cetusnya.

Harus berani

Kalangan legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta untuk berani memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara disiplin.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menandaskan, semua elemen harus bahu-membahu dalam menangani pandemi, serta tidak membebankan pada pemerintah.

"Penanganan Covid-19 butuh peran aktif masyarakat, seperti di awal-awal dulu. Sebab, tanpa dukungan masyarakat, maka usaha pemerintah pun akan sia-sia, tidak ada artinya lah," katanya, saat dikonfirmasi.

Karena itu, tambah Fokki, sudah saatnya Pemkot Yogyakarta mengganjar sanksi

tegas, terhadap para pelaku usaha yang masih melanggar itu. Apalagi, jumlah pelanggarnya pun diketahui tidak sedikit, bahkan mendominasi.

"Betul, karena proses preventif sebenarnya sudah selesai ya, sekarang saatnya penindakan. Jadi, negara tidak boleh kalah, demi keselamatan orang banyak," terangnya.

Sehingga, seandainya teguran lisan dan tertulis yang telah dilayangkan tetap tidak digubris oleh pemilik usaha. Pemkot harus berani melakukan penutupan. Jangan sampai, sanksi hanya dianggap sebagai gertak sambal saja.

"Ya, harus. Proses hukum saja sesuai dengan aturan yang berlaku," tandas Anggota Komisi B tersebut.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu tidak menampik, mereka sebenarnya "terpaksa" melanggar protokol kesehatan, demi kepentingan ekonomi. Walau begitu, sanksi tetap menjadi konsekuensi bagi setiap jenis pelanggaran.

"Karena tuntutan ekonomi sebenarnya. Tapi, kalau itu tanpa diimbangi kepedulian terhadap protokol kesehatan, ya harus ada tindakan tegas. Bagaimanapun juga protokol kesehatan adalah yang utama," pungkas Fokki. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005